

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI
TERHADAP BIODIVERSITY DISCLOSURE
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks SRI-KEHATI Bursa Efek
Indonesia Tahun 2018-2021)**

Nita Pratiwi

Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta

nita3925fe.2019@student.uny.ac.id

Dhyah Setyorini

Staf Pengajar Departemen P. Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

dhyah_setyorini@uny.ac.id

Abstrak

Kerusakan lingkungan yang terjadi dalam skala besar-besaran berdampak kepada semakin berkurangnya biodiversitas. Biodiversitas memiliki peran penting yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia dan memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi. Kondisi ini membuat berbagai pihak menyadari pentingnya kontribusi mereka untuk mencegah kerusakan yang lebih parah lagi, tak terkecuali perusahaan yang baik secara langsung atau tidak banyak berhutang pada lingkungan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Dewan Komisaris (Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Wanita) dan (2) Dewan Direksi terhadap *Biodiversity Disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI-KEHATI Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah 4 (empat) tahun yakni dari tahun 2018 hingga 2021. Populasi penelitian ini diambil dari perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 36 data dari 9 (sembilan) perusahaan yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi data sekunder yang bersumber dari website, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Kemudian, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan Dewan Komisaris (Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Wanita) terbukti tidak berpengaruh terhadap *biodiversity disclosure*, sedangkan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *biodiversity disclosure*.

Kata kunci: *Biodiversity Disclosure*, Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Wanita, Dewan Direksi

Abstract

Environmental damage that occurs on a large scale has an impact on decreasing biodiversity. Biodiversity has an important role that is useful for human survival and plays a central role in economic development. This condition makes various parties realize the importance of their contribution to prevent further damage, including companies that either directly or indirectly owe a lot to the environment. This study aims to determine the effect of: (1) the Board of Commissioners (the size of the Board of Commissioners, the Independent Board of Commissioners, the Board of Commissioners of Women) and (2) the Board of Directors on Biodiversity Disclosure in companies listed on the SRI-KEHATI Index on the Indonesia Stock Exchange. The period used in this study is 4 (four) years, from 2018 to 2021. The population

for this study was taken from companies listed on the SRI-KEHATI index on the Indonesia Stock Exchange. The sample used in this study was 36 data from 9 (nine) companies which were determined by the purposive sampling method. Data collection techniques with secondary data documentation sourced from websites, annual reports and corporate sustainability reports. Then, the analysis technique used is logistic regression analysis technique. The results showed that the Board of Commissioners (the size of the Board of Commissioners, Board of Independent Commissioners, Board of Commissioners of Women) proved to have no effect on biodiversity disclosure, while the Board of Directors had a positive effect on biodiversity disclosure.

Keywords: *Biodiversity Disclosure, Board of Commissioners, Size of the Board of Commissioners, Independent Board of Commissioners, Women's Board of Commissioners, Board of Directors*

PENDAHULUAN

Biodiversitas didefinisikan sebagai banyaknya jenis (spesies) makhluk hidup, variasi genetik dalam suatu spesies, serta keragaman habitat dan ekosistem (Roe, D., *et al.*, 2018). Keberadaan biodiversitas sangat berharga bagi kelangsungan hidup manusia dan berperan sentral dalam pembangunan ekonomi. Biodiversitas bukan hanya merupakan beragamnya antar jenis organisme hayati, keragaman ini terjadi pada seluruh aspek hayati yang membingkai kehidupannya. Keragaman dalam seluruh aspek hayati ini menjadi sebuah manfaat bagi keberadaan dan kesejahteraan manusia di kehidupan muka bumi ini (Jones *et al.* 2020).

Indonesia merupakan salah satu pusat biodiversitas di dunia dengan banyaknya spesies tumbuhan dan hewan yang sangat berlimpah (von Rintelen *et al.*, 2017). Data statistik Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015, menyatakan bahwa Indonesia memiliki 4.300 jenis satwa termasuk 1.501

adalah spesies endemik dan 38.000 spesies tumbuhan termasuk sekitar 25.000 spesies endemik (Kemen LH, 2015). Meskipun demikian, data dari *World Economic Forum* (2015) menyatakan bahwa laju percepatan kerusakan ekosistem dan hilangnya biodiversitas saat ini merupakan salah satu dari sepuluh faktor risiko global. *World Wildlife Fund* (2018) menyatakan bahwa tingkat kepunahan spesies telah meningkat antara 1.000-10.000 kali lipat dari tingkat kepunahan alami. Hal tersebut dapat berdampak bagi masa depan bumi karena tingkat kepunahan biodiversitas yang terus meningkat dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.

Melihat kondisi tersebut, permasalahan ini membutuhkan solusi dari banyak pihak, termasuk perusahaan. Perusahaan dianggap berkontribusi terhadap penurunan jumlah biodiversitas dan kerusakan ekosistem. Hal tersebut menyadarkan beberapa pihak akan pentingnya melestarikan biodiversitas.

Griffiths (2014) menyarankan agar kerusakan potensial ekosistem dan penurunan jumlah biodiversitas dijadikan pertimbangan material dalam membuat berbagai keputusan investasi di Indonesia. Perusahaan dan investor percaya bahwa biodiversitas merupakan pusat dari kesuksesan bisnis dalam memperoleh karbon dan sumber daya alami yang terbatas lainnya.

Bukti kesadaran bahwa perusahaan telah berusaha untuk melestarikan biodiversitas harus diungkapkan pada pelaporan laporan keberlanjutan. Hingga saat ini, *biodiversity disclosure* merupakan bagian dari pelaporan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan salah satu bentuk dari pelaporan yang menunjukkan sikap transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan standar-standar yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Laporan keberlanjutan mendukung penetapan tujuan, pengukuran kinerja, serta manajemen operasional perusahaan yang berkelanjutan (GRI, 2013).

Penelitian tentang pelaporan laporan keberlanjutan, termasuk *biodiversity disclosure* dapat dikatakan sudah mulai bermunculan. Literatur yang ada telah memberikan kontribusi wawasan tentang hubungan kompleks antara perusahaan dan ekosistem alam karena mereka secara tidak

langsung memiliki kewajiban moral untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan banyak orang (Roberts *et al.* 2021). Namun, sebagian besar penelitian tentang topik ini adalah studi literatur kualitatif (Mahyuddin *et al.* 2021). Kajian terbatas hanya terkonsentrasi pada sejauh mana pelaporan biodiversitas dipraktikkan oleh perusahaan di suatu negara (Boiral dan Heras-Saizarbitoria, 2017; Rimmel dan Jonäll, 2013; van Liempd dan Busch, 2013); mengembangkan kerangka kerja dan pengukuran (Addison *et al.* 2020; Houdet *et al.* 2020); Sementara itu, kajian tentang faktor-faktor pendorong pengungkapan *corporate biodiversity* khususnya karakteristik dewan komisaris masih jarang ditemukan.

Karakteristik dewan komisaris (ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan komisaris wanita) merupakan komponen penting dari tata kelola perusahaan. Karakteristik dewan komisaris dianggap vital karena dapat mewakili pemangku kepentingan yang mengawasi perusahaan sesuai dengan kepentingannya. Posisi tersebut mengarahkan karakteristik dewan komisaris untuk memiliki kekuasaan atas bagaimana sebuah perusahaan membangun strategi yang menguntungkan berbagai pihak tidak hanya

stakeholders, tetapi juga lingkungan, alam, dan masyarakat (Elkington, 2006).

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dari dewan komisaris yang terdiri dari banyaknya anggota dewan komisaris di suatu perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 jumlah dewan komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Yan (2017) berpendapat bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka akan semakin baik pengawasan yang dapat dilakukan. Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak dalam perusahaan dapat mempengaruhi *biodiversity disclosure*, dikarenakan ukuran dewan komisaris yang tinggi dapat berpengaruh terhadap luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh dewan komisaris dalam perusahaan (Shamil *et al.*, 2014).

Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dalam proporsi dewan komisaris mengharuskan adanya dewan komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral untuk keputusan yang ditentukan oleh dewan

direksi (Ratnasari dan Pratiwi, 2010). Adanya sikap netral di dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat menerbitkan *biodiversity disclosure* dengan baik dan terbuka sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari perusahaan.

Dewan komisaris wanita diyakini anggota dewan memiliki kepekaan yang besar terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang menjadi perhatian *stakeholders* saat ini, termasuk risiko biodiversitas (Haque dan Jones 2020). Dalam mengambil keputusan wanita selalu mempertimbangkan segala hal sehingga keputusan yang dia buat bisa berdampak positif dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Wanita biasanya selalu berhati-hati dalam segala hal, dan selalu melibatkan banyak pertimbangan dalam menentukan suatu langkah untuk perusahaannya. Maka dari itu, wanita cenderung lebih menghindari risiko di dalam pekerjaannya. Wanita biasanya sangat lebih mengatur terhadap perusahaannya, dia akan lebih menekankan aturan untuk menyelesaikan segala tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perusahaan. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dewan, terutama terkait dengan *biodiversity disclosure*.

Dewan direksi merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. Tugas dan fungsi utama dewan direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Tugas utama lainnya adalah mengupayakan perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan pemegang saham (Darini, 2005). Menurut teori agensi, besaran ukuran dewan direksi akan mampu mengurangi masalah koordinasi dan meningkatkan kemampuan dewan untuk melakukan tindakan strategis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengaitkan dewan direksi dalam struktur *corporate governance* dengan *biodiversity disclosure*.

Dari literatur yang ada, *biodiversity disclosure* dianggap sebagai salah satu aspek lingkungan dalam laporan keberlanjutan. Namun, penelitian yang fokus membahas pengungkapan *biodiversity disclosure* pun masih sangat terbatas (Mahyuddin *et al.* 2021). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris dan dewan direksi terhadap *biodiversity disclosure* (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-

KEHATI Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021).

KAJIAN LITERATUR

Biodiversity Disclosure

Menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD/*Convention on Biological Diversity*). CBD mendefinisikan *biodiversity disclosure* adalah pengungkapan informasi tentang dampak suatu aktivitas organisasi terhadap keanekaragaman di antara organisme hidup dari semua sumber termasuk, ekosistem darat, laut dan perairan lainnya dan kompleks ekologis di mana mereka menjadi bagian: termasuk keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.

Belakangan ini, sudah banyak *framework* pelaporan yang dapat dioperasikan oleh perusahaan, seperti standar pelaporan dari *Global Reporting Initiative* (GRI), *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), dan *Carbon Disclosure Project* (CDP). Di antara standar tersebut, GRI merupakan kerangka pelaporan lingkungan paling dominan yang dilaporkan oleh banyak perusahaan di dunia (Potdar *et al.* 2016).

GRI umumnya dianggap paling andal dan terperinci (Atkins dan Maroun, 2018; Boiral, 2016; Zhao dan Atkins, 2021). Dalam standar GRI versi terbaru, item pengungkapan spesifik terkait biodiversitas telah diatur dalam GRI 304. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami skala biodiversitas dengan lebih baik dan memberikan informasi yang lebih akurat dan jelas (Zhao dan Atkins, 2021). Dalam standar ini, GRI memberikan panduan tentang bagaimana perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang dampak atau penanggulangan terhadap hilangnya biodiversitas.

Dalam konteks Indonesia, selain menggunakan pedoman dari GRI, perusahaan publik diwajibkan untuk menggunakan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan (Adhariani dan Du Toit, 2020). Pemerintah dan perusahaan terus bekerja sama untuk meningkatkan kontribusi lingkungan dan keberlanjutan mereka. Bukti dari pemerintah dapat dilihat dalam beberapa regulasi dan rencana strategis konservasi, seperti

Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015-2020 (Darajati, 2016).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris didefinisikan sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Selain mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dewan komisaris juga memberikan saran dan analisis yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang atau mungkin dihadapi perusahaan di masa depan (Bae *et al.* 2018). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki keanggotaan yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota dewan komisaris, harus memiliki jumlah dewan komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris juga dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain dan anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.

Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris dilakukan sebagai perwakilan dari pemegang saham untuk memantau perusahaan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yaitu

manajemen (Fama dan Jensen 1983). Selain mengurangi konflik keagenan, anggota dewan yang lebih beragam dapat mewakili kelompok kepentingan minoritas dengan lebih baik dalam proses pengambilan keputusan.

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. 1 (satu) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Ukuran dewan yang besar dapat mengurangi kesenjangan melalui kemampuan untuk berbagi keterampilan, pengalaman, informasi, dan sumber daya (Nasih *et al.* 2019). Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris yang besar lebih cenderung meningkatkan pengungkapan keberlanjutan untuk mengurangi tekanan dan kekhawatiran pemangku kepentingan kerusakan lingkungan, seperti meningkatnya hilangnya biodiversitas. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang besar akan merepresentasikan pengetahuan, pendidikan, dan latar belakang yang lebih beragam sehingga akan lebih efektif dalam mengambil keputusan-keputusan strategis terutama

untuk menangani isu-isu keberlanjutan seperti masalah biodiversitas.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan memiliki pengetahuan luas tentang bidang tertentu yang berperan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada anggota dewan lainnya (Bae *et al.* 2018).

Berdasarkan teori keagenan, banyak dewan komisaris independen cenderung memantau dan mengendalikan manajemen dengan lebih baik, sehingga membuat perusahaan lebih transparan (Naciti, 2019). Sementara itu, berdasarkan teori pemangku kepentingan, dewan komisaris independen mewakili semua kepentingan berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Hal ini mentolerir dewan komisaris independen untuk memberi tekanan lebih pada perusahaan untuk menerapkan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan mereka. Dengan demikian, dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi diharapkan dapat mendesak manajemen untuk memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi dan melaporkan lebih banyak informasi biodiversitas melalui laporan perusahaan.

Dewan Komisaris Wanita

Dewan komisaris wanita diyakini anggota dewan komisaris lainnya menunjukkan kepekaan yang lebih besar terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang menjadi perhatian pemangku kepentingan saat ini, termasuk risiko keanekaragaman hayati (Haque dan Jones, 2020). Mereka menemukan dari sumber literatur yang dikumpulkan bahwa terdapat tekanan global untuk meningkatkan proporsi dewan komisaris wanita dalam mekanisme tata kelola perusahaan. Hal ini juga dikuatkan oleh Glass *et al.* (2016) bahwa women on the board lebih fokus pada keputusan dan strategi perusahaan jangka panjang serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Situasi tersebut tidak terlepas dari sifat perempuan yang lebih altruistik dibandingkan laki-laki dan lebih berasosiasi dengan karakter otonom, individualistis, dan kompetitif (Liao *et al.* 2015).

Selain itu, dewan komisaris wanita cenderung mendorong diskusi terbuka, berbagi informasi, dan memberikan partisipasi yang lebih besar dalam pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dewan, terutama yang terkait dengan biodiversitas (Haque dan Jones, 2020). Hal ini diperkuat oleh pernyataan

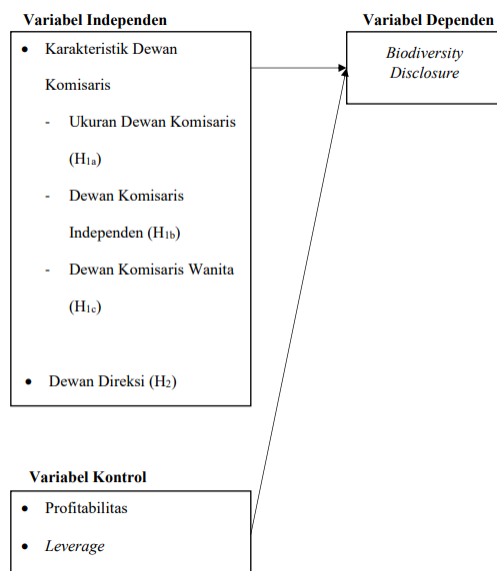
Carter *et al.* (2003) bahwa dengan adanya keberagaman dewan komisaris dipercaya dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah yang beragam daripada anggota dewan komisaris yang homogen.

Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan direksi dalam menjalankan aktivitasnya diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi dewan direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Selain itu, Hidalgo *et al.* (2011) menyatakan bahwa lebih banyak dewan direksi dalam struktur dewan perusahaan dapat mengkompensasi kekuarangan individu dalam pengambilan keputusan. Menurut teori agensi, besaran

ukuran dewan direksi akan mampu mengurangi masalah koordinasi dan meningkatkan kemampuan dewan direksi untuk melakukan tindakan strategis dalam pengambilan keputusan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

H_{1a}: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Biodiversity Disclosure*.

H_{1b}: Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Biodiversity Disclosure*.

H_{1c}: Dewan Komisaris Wanita berpengaruh signifikan terhadap *Biodiversity Disclosure*.

H₂: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap *Biodiversity Disclosure*.

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdapat di Indonesia. Perusahaan yang dimaksud terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) yaitu: perusahaan-perusahaan yang terdaftar Indeks SRI-KEHATI periode 2018-2021. Waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dimulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada indeks SRI-KEHATI (indeks yang menjadi indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia) sebanyak 28 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan yang terpilih masuk ke dalam indeks SRI-KEHATI serta melaporkan laporan keberlanjutan (sustainability report) perusahaan pada tahun 2018-2021.
- Perusahaan melaporkan pengungkapan biodiversity disclosure tahun 2018-2021.

3. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

1) Biodiversity Disclosure

Biodiversity disclosure adalah pengungkapan informasi tentang dampak suatu aktivitas organisasi terhadap keanekaragaman di antara organisme hidup dari semua sumber termasuk, ekosistem darat, laut dan perairan lainnya dan kompleks ekologis di mana mereka menjadi bagian: termasuk keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Dalam penelitian ini, pengukuran menggunakan indikator GRI sebanyak 53 item pengukuran dan membaginya menjadi lima tema utama.

Selain itu, data diperoleh dengan metode analisis isi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Pengukuran menggunakan metode *dummy* untuk mempertimbangkan keragaman dan kualitas informasi yang dilaporkan oleh perusahaan.

b. Variabel Independen

1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris didefinisikan sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Selain mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dewan komisaris juga memberikan saran dan analisis yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang atau mungkin dihadapi perusahaan di masa depan (Bae *et al.* 2018).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karakteristik dewan komisaris sebagai berikut:

a) Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Menurut Ujunwa (2012) rumus pengukuran dewan komisaris sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris} = \text{Natural log dari jumlah Dewan Komisaris}$$

b) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan memiliki pengetahuan luas tentang bidang tertentu yang berperan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada anggota dewan lainnya (Bae *et al.* 2018). Menurut Djuitaningsih dan Martatitlova (2012) rumus pengukuran proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut:

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

c) Dewan Komisaris Wanita

Variabel dewan komisaris wanita ditandai dengan adanya keberagaman gender dalam susunan anggota dewan komisaris.

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang dewan komisarisnya bergender wanita akan diberi simbol dengan nomor 1. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki dewan direksi wanita, maka akan diberikan nilai 0.

2) Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (POJK No.33, 2014). Menurut Situmorang (2016) rumus pengukuran dewan direksi sebagai berikut:

Dewan Direksi

= *Natural log dari jumlah Dewan Direksi*

c. Variabel Kontrol

1) Profitabilitas perusahaan (ROA)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Novari, 2016). Menurut Puspita dan Febrianti (2017) rumus pengukuran profitabilitas perusahaan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Profit}{Total\ Equity} \times 100\%$$

2) Leverage perusahaan

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan sumber dana yang memiliki biaya tetap (*fixed cost*) untuk memperbesar tingkat penghasilan

(*return*) bagi pemilik perusahaan (Fahmi, 2013). Menurut Mamduh dan Halim (2016) rumus pengukuran *leverage* perusahaan sebagai berikut:

$$Lev = \frac{Total\ Debt}{Total\ Asset} \times 100\%$$

4. Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan

a. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data laporan tahunan perusahaan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dari perusahaan terdaftar Indeks SRI-KEHATI. Data diperoleh dengan mengakses *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.com dan langsung dari *website* perusahaan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Model analisis statistik yang digunakan adalah model regresi logistik. Model analisis ini dipilih karena penelitian ini menggunakan variabel dependen yang berupa variabel *dummy*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yang

digunakan dalam penelitian ini berupa mean, modus, dan standar deviasi. Data penelitian dianalisis menggunakan IBM SPSS *Statistics* 25. Deskripsi terkait data masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
UDK	36	1,100	2,300	1,804	0,331
DKI	36	0,000	1,740	1,134	0,396
DKW	36	0,000	1,000	0,636	0,489
DD	36	1,390	2,400	1,759	0,249
Profit (K ₁)	36	-0,03	0,310	0,669	0,079
Lev (K ₂)	36	0,130	0,830	0,500	0,273
BD (Y)	36	0,000	1,000	0,515	0,508
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data sekunder yang diolah

a. Analisis deskriptif variabel *biodiversity disclosure* didapatkan nilai *mean* sebesar 0,515 dan standar deviasi sebesar 0,508. Pada penelitian ini, nilai minimum variabel dependen adalah 0 dan nilai maksimum adalah 1.

b. Dewan Komisaris

Dalam penelitian ini, pengukuran karakteristik dari dewan komisaris dibedakan sebagai berikut:

1) Hasil analisis statistik deskriptif Ukuran Dewan Komisaris didapatkan nilai minimum sebesar 1,100 dan nilai maksimum 2,300. Pada penelitian ini, nilai *mean* Ukuran Dewan Komisaris didapatkan 1,804 dengan standar deviasi 0,331.

2) Hasil analisis statistik deskriptif Dewan Komisaris Independen didapatkan nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum 1,740. Pada penelitian ini, nilai *mean* Dewan Komisaris Independen didapatkan 1,134 dengan standar deviasi 0,396.

3) Hasil analisis statistik deskriptif Dewan Komisaris Wanita didapatkan nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum 1,000. Pada penelitian ini, nilai *mean* Dewan Komisaris Wanita didapatkan 0,636 dengan standar deviasi 0,489.

c. Hasil analisis statistik deskriptif Dewan Direksi didapatkan nilai minimum sebesar 1,390 dan nilai maksimum 2,400. Pada penelitian ini, nilai *mean* Dewan Direksi didapatkan 1,759 dengan standar deviasi 0,249.

d. Hasil analisis statistik deskriptif Profitabilitas didapatkan nilai minimum sebesar -0,030 dan nilai maksimum 0,310. Pada penelitian ini, nilai *mean* Profitabilitas didapatkan 0,069 dengan standar deviasi 0,079.

e. Hasil analisis statistik deskriptif *Leverage* didapatkan nilai minimum sebesar 0,130 dan nilai maksimum 0,830. Pada penelitian ini, nilai *mean Leverage* didapatkan 0,500 dengan standar deviasi 0,273.

2. Hasil Uji Hipotesis

Menilai Model Fit

Hasil pengujian *omnibus test of model coefficient* diperoleh nilai *Chi-Square* sebesar 15,750 dengan nilai signifikansi 0,015. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 4 variabel independen (ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan komisaris wanita, dewan direksi) secara simultan mempengaruhi variabel dependen (*biodiversity disclosure*).

Tabel 2. Hasil *Omnibus Test of Model Coefficient*

		Chi-Square	Df	Sig.
Step 1	Step	15.750	6	0,015
	Block	15.750	6	0,015
	Model	15.750	6	0,015

Sumber: Data yang diolah

Menilai Kelayakan Regresi

Hasil pengujian pada uji *hosmer and lomeshow's goodness of fit test* diperoleh nilai 1,640 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,990 dan nilai Df 8. Nilai signifikansi yang memberikan hasil sebesar 0,990 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 0 diterima atau dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antar variabel. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data empiris dengan model sehingga model regresi logistik yang digunakan dapat diterima.

Tabel 3. Hasil Uji *Hosmer and Lomeshow's Goodness of Fit Test*

Step	Chi-square	Df	Sig
1	1.640	8	.990

Sumber: Data yang diolah

Koefisien Determinasi

Hasil uji model *summary* diperoleh uji model -2 Log *Likelihood* senilai 29,967 dengan koefisien determinasi dari *Nagelkerke R Square* senilai 0,506. Hal ini berarti bahwa sumbangan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Wanita, dan Dewan Direksi terhadap variabel model dependen *biodiversity disclosure* sebesar 50,6% dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Model *Summary*

Step	-2 Log Likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	29,967	0,380	0,506

Sumber: Data yang diolah

Pengujian Secara Parsial

Melalui persamaan regresi logistik tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu koefisien dewan komisaris independen memberikan hasil sebesar 1,810 serta dewan direksi memberikan hasil sebesar 12,053 menandakan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen dan dewan direksi, maka probabilitas perusahaan akan melakukan pembuatan laporan semakin besar.

Tabel 5. Hasil Uji Secara Parsial

	B	S.E.	Wald	Sig
Step 1				0,051
UDK	-8,294	4,253	3,802	
DKI	1,810	1,308	1,915	0,166
DKW	-1,824	1,194	2,333	0,127
DD	12,053	5,686	4,493	0,034
Profit (K1)	21,299	12,069	3,114	0,078
Lev (K2)	2,704	3,023	0,822	0,365
Constant	-	6,782	2,200	0,138
	10,060			

Sumber: Data yang diolah

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Biodiversity Disclosure*

Hasil pengujian menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *biodiversity disclosure*. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil koefisien regresi sebesar negative 8,294 dengan nilai signifikansi 0,051 yang nilai tersebut diatas 0,050 maka hipotesis pertama di dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hambali, A., & Adhariani, D. (2022) dimana menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap *biodiversity disclosure*.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiani & Sinaga (2021), Sulistyawati & Qadriatin (2018) dan Barung *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *biodiversity disclosure*. Hal tersebut membuktikan bahwa

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh dalam memantau kualitas pelaporan yang dilakukan pihak manajemen dalam mengungkapkan informasi yang luas dalam pelaporan *biodiversity disclosure* (Sulistyawati & Qadriatin, 2018). Besar kecilnya ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan *biodiversity disclosure* karena yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi yaitu adanya kesadaran dari perusahaan untuk menerapkan prinsip keterbukaan/transparansi dan akuntabilitas terhadap lingkungan dan *stakeholders*, hal ini dapat menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris bukan menjadi dasar utama bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Biodiversity Disclosure*

Hasil pengujian menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *biodiversity disclosure*. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil koefisien regresi sebesar 1,810 dengan nilai signifikansi 0,166 yang nilai tersebut diatas 0,050 maka hipotesis kedua di dalam penelitian ini ditolak. Berlawanan dengan harapan peneliti, komisaris independen diharapkan untuk memberikan tekanan yang lebih besar kepada manajemen untuk

mengungkapkan isu-isu sosial dan lingkungan karena mereka mewakili pemangku kepentingan yang lebih luas. Menurut Bae *et al.* (2018), dewan independen memainkan peran yang efektif dan penting atas nama pemangku kepentingan eksternal dan publik karena keterampilan, pengalaman, hubungan eksternal (politik), komitmen tinggi, dan tidak terikat dengan kepentingan internal perusahaan.

Penjelasan yang lebih logis untuk ketidakkonsistenan ini adalah efek negara. Studi ini berfokus pada hubungan antara tata kelola dan pengungkapan biodiversitas pada perusahaan di Indonesia. Hasil kajian yang lebih spesifik menggunakan Indonesia sebagai sampel telah mendukung temuan peneliti (Nasih *et al.* 2019; Purbawangsa *et al.* 2019; Trireksani dan Djajadikerta, 2016).

Purbawangsa dkk. (2019) meneliti hubungan antara tata kelola dan pengungkapan sosial lingkungan perusahaan di negara berkembang, termasuk Indonesia, juga menemukan bahwa proporsi Komisaris Independen tidak mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena kecilnya proporsi dewan komisaris independen, sehingga tidak mampu memberikan pengaruh yang lebih besar dan dapat dikatakan bahwa perusahaan di Indonesia hanya sebatas memenuhi

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.

Pengaruh Dewan Komisaris Wanita terhadap Biodiversity Disclosure

Proporsi perempuan dalam dewan komisaris juga tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *biodiversity disclosure*. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil koefisien regresi sebesar negatif 1,824 dengan nilai signifikansi 0,127 yang nilai tersebut diatas 0,050 maka hipotesis kedua di dalam penelitian ini ditolak. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki anggota dewan komisaris perempuan. Rendahnya proporsi perempuan di dewan komisaris dapat menjadi penyebab kurang berpengaruhnya keputusan mereka untuk menentukan keputusan dan kebijakan terkait pengungkapan *biodiversity disclosure*. Selain itu, hal ini juga tidak terlepas dari budaya dan faktor negara tempat pengambilan sampel (Naciti, 2019). Perempuan memiliki pengaruh positif terhadap *sustainability reporting* di negara maju (Alazzani *et al.* 2019) seperti Amerika Serikat (Hussain *et al.* 2018); Polandia (Matuszak *et al.* 2019); dan negara-negara lain di Eropa dan Amerika (Naciti, 2019).

Alasan yang paling penting dari kesimpulan penelitian ini adalah Indonesia

masih tergolong sebagai negara berkembang. Berbeda dengan negara maju yang kesetaraan gendernya lebih tinggi, budaya patriarki masih mengakar kuat di Indonesia (Syukur dan Bagshaw, 2020). Diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memperbanyak anggota dewan komisaris perempuan untuk meningkatkan keberagaman di dewan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelaporan tentang kemampuan keberlanjutan perusahaan, khususnya pelaporan tentang *biodiversity disclosure*.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Biodiversity Disclosure

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa variabel dewan direksi menunjukkan hasil koefisien sebesar 12,053 dengan tingkat signifikansi 0,034 dimana nilai tersebut kurang dari 0,050. Berdasarkan nilai signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap *biodiversity disclosure*. Hasil penelitian ini berhasil menunjukkan berlakunya teori *stakeholder* sebagai teori yang mendasari penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksana (2015) hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Daily (2004) yang menemukan bukti empiris bahwa hubungan antara jumlah dewan direksi dan kinerja keuangan perusahaan adalah linear

dan positif, atau dengan kata lain semakin tinggi jumlah dewan direksi maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah dewan direksi, maka semakin banyak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bisnis perusahaan oleh manajer serta memastikan agar manajer mengikuti kepentingan dewan.

Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Biodiversity Disclosure

Hasil profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *biodiversity disclosure*. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil koefisien regresi profitabilitas dan *leverage* sebesar 21,299 dan 2,740 dengan nilai signifikansi 0,078 dan 0,365. Banyak penelitian menemukan hubungan yang tidak signifikan dari hubungan ini. Tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi tingkat permintaan pemangku kepentingan bagi perusahaan untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutannya, terlepas dari ukuran dan status keuangan perusahaan. Temuan ini didukung oleh banyak penelitian (Bae *et al.* 2018; Haque and Jones 2020; Hussain *et al.* 2018; Nasih *et al.* 2019; Roberts *et al.* 2021; Skouloudis *et al.* 2019; Sun *et al.* 2021). *Leverage* juga bukan faktor pendorong *biodiversity disclosure*. Hal ini dapat

diartikan bahwa kreditur tidak terlalu tertarik dengan informasi kinerja non keuangan perusahaan. Mereka cenderung menggunakan perjanjian untuk melindungi kepentingan mereka (Bae *et al.* 2018; Naciti 2019; Sun *et al.* 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Hilangnya biodiversitas, baik karena ulah manusia maupun alam itu sendiri, merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap lingkungan secara global (Mahyuddin *et al.* 2021; Skouloudis *et al.* 2019). Mengenai kontribusi perusahaan terhadap konservasi biodiversitas dan pencegahan kepunahan, peneliti menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan memainkan peran cukup penting. Hasil penelitian menunjukkan Dewan Komisaris (Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Wanita) terbukti tidak berpengaruh terhadap *biodiversity disclosure*, sedangkan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *biodiversity disclosure*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya yaitu dapat menambahkan sektor perusahaan selain indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di

dalam Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat menggunakan metode penelitian kualitatif seperti melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan. Pendekatan ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan *biodiversity disclosure*, seperti yang ditemukan dalam penelitian ini. Diharapkan pula dapat mempertimbangkan variabel selain yang digunakan dalam penelitian ini seperti jumlah rapat dewan komisaris dan dewan direksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Addison, P. F. E., Stephenson, P. J., Bull, J. W., Carbone, G., Burgman, M., Burgass, M. J., Gerber, L. R., Howard, P., McCormick, N., McRae, L., Reuter, K. E., Starkey, M., & Milner-Gulland, E. J. (2020). Bringing sustainability to life: A framework to guide biodiversity indicator development for business performance management. *Business Strategy and the Environment*, 29(8), 3303–3313.
<https://doi.org/10.1002/bse.2573>
- Asih & Pratiwi. (2010). Perilaku Prososial ditinjau dari Empati dan Kematangan Emosi. *Jurnal Psikologi*, 1(1).
- Atkins, J., & Maroun, W. (2018). Integrated extinction accounting and accountability: building an ark. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(3), 750–786.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2017-2957>

- Bae, S., Masud, Md., & Kim, J. (2018). A Cross-Country Investigation of Corporate Governance and Corporate Sustainability Disclosure: A Signaling Theory Perspective. *Sustainability*, 10(8), 2611. <https://doi.org/10.3390/su10082611>
- Boiral, O. (2016). Accounting for the Unaccountable: Biodiversity Reporting and Impression Management. *Journal of Business Ethics*, 135(4), 751–768. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2497-9>
- Darajati, W. (2016). Indonesian biodiversity strategy and action plan, 2015-2020. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS*.
- Djuitaningsih, Tita dan Dwi Sonya Martatilova. 2012. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure, Kepemilikan Manajemen dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan*. Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis Universitas Widyatama. Bandung.
- Elkington, J. (2006). Governance for Sustainability. *Corporate Governance: An International Review*, 14(6), 522–529. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2006.00527.x>
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- Glass, C., Cook, A., & Ingersoll, A. R. (2016). Do Women Leaders Promote Sustainability? Analyzing the Effect of Corporate Governance Composition on Environmental Performance. *Business Strategy and the Environment*, 25(7), 495–511. <https://doi.org/10.1002/bse.1879>
- GRI. (2013). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4. In Global Reporting Initiative.
- Griffiths, J. (n.d.). Biodiversity should be a top priority for businesses. *Guardian sustainable business*. Diakses pada Februari 2023 dari <https://www.theguardian.com/sustainable-business/>
- Hambali, A., & Adhariani, D. (2022). Biodiversity Disclosure Of Indonesian Companies and the Role of the Board of Commissioners. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 1–23. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.01>
- Hanafi, Mamduh. M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke- 5*. UPP STIM YKPN.
- Haque, F., & Jones, M. J. (2020). European firms' corporate biodiversity disclosures and board gender diversity from 2002 to 2016. *The British Accounting Review*, 52(2), 100893. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100893>
- Hassan, A. M., Roberts, L., & Atkins, J. (2020). Exploring factors relating to extinction disclosures: What motivates companies to report on biodiversity and species protection? *Business Strategy and the Environment*, 29(3), 1419–1436. <https://doi.org/10.1002/bse.2442>
- Houdet, J. et al. 2020. Adapting doubleentry bookkeeping to renewable natural capital: An application to corporate net biodiversity impact accounting and disclosure. *Ecosystem Services*, 45, 101104.
- Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate Governance and Sustainability Performance: Analysis of

- Triple Bottom Line Performance. *Journal of Business Ethics*, 149(2), 411–432. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3099-5>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Lingkungan Hidup (2015). *Keanekaragaman Hayati*. Diakses pada Februari 2023 dari <http://www.menlh.go.id/keanekaragamahayati/>
- Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2015). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. *The British Accounting Review*, 47(4), 409–424. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.002>
- M. Shamil, M., M. Shaikh, J., Ho, P.-L., & Krishnan, A. (2014). The influence of board characteristics on sustainability reporting. *Asian Review of Accounting*, 22(2), 78–97. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2013-0060>
- Mahyuddin, E. F. B. H., Iranmanesh, M., Amran, A., & Foroughi, B. (2022). The impact of board and hotel characteristics on biodiversity reporting: market diversification as a moderator. *Social Responsibility Journal*, 18(2), 403–423. <https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2019-0072>
- Naciti, V. (2019). Corporate governance and board of directors: The effect of a board composition on firm sustainability performance. *Journal of Cleaner Production*, 237, 117727. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117727>
- Nasih, M., Harymawan, I., Paramitasari, Y. I., & Handayani, A. (2019). Carbon Emissions, Firm Size, and Corporate Governance Structure: Evidence from the Mining and Agricultural Industries in Indonesia. *Sustainability*, 11(9), 2483. <https://doi.org/10.3390/su11092483>
- Novari, P. M., & Putu V. Lestari. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Properti dan Real Estate. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(9).
- PBB. (2015). Sustainable Development Goals. Diakses pada Februari 2023 dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>
- Potdar, A., Gautam, R., Singh, A., Unnikrishnan, S., & Naik, N. (2016). Business reporting on biodiversity and enhancement of conservation initiatives. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management*, 12(3), 227–236. <https://doi.org/10.1080/21513732.2016.1145144>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Rimmel, G., & Jonäll, K. (2013). Biodiversity reporting in Sweden: corporate disclosure and preparers' views. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(5), 746–778. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2013-1228>

- Roberts, L., Hassan, A., Elamer, A., & Nandy, M. (2021). Biodiversity and extinction accounting for sustainable development: A systematic literature review and future research directions. *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 705–720. <https://doi.org/10.1002/bse.2649>
- Roe, D., Seddon, N., & Elliott, J. (2018). *Biodiversity loss is a development issue A rapid review of evidence*. www.iied.org
- Situmorang, R., & Hadiprajitno, B. (2016). Pengaruh Karakteristik Dewan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan *Sustainability Reporting*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ujunwa, A. (2012). Board characteristics and the financial performance of Nigerian quoted firms. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 12(5), 656–674. <https://doi.org/10.1108/14720701211275587>
- van Liempd, D., & J Busch. (2013). Biodiversity reporting in Denmark. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(5), 833–872.
- von Rintelen, K., Arida, E., & Häuser, C. (2017). A review of biodiversity-related issues and challenges in megadiverse Indonesia and other Southeast Asian countries. *Research Ideas and Outcomes*, 3. <https://doi.org/10.3897/rio.3.e20860>
- World Economic Forum. (2015). Executive Summary. Diakses pada Februari 2023 dari http://reports.weforum.org/globalrisks2015/executivesummary/?doing_wp_cron=1652017135.7091019153594970703125
- WWF. (2018). How many species are we losing?. Diakses pada Februari 2023 dari https://wwf.panda.org/discover/our_focus/biodiversity/biodiversity/
- Zhao, L., & Atkins, J. (2021). Assessing the Emancipatory Nature of Chinese Extinction Accounting. *Social and Environmental Accountability Journal*, 41(1–2), 8–36. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2021.1889386>